

Konsultasi Publik

atas Dokumen Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan, IPP) dan revisi Rencana Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Plan, BSP), sebagai bagian dari FCPF.

Pemerintah Indonesia mengundang masyarakat untuk menyampaikan masukan atas IPP dan rancangan revisi BSP untuk Program Pengurangan Emisi berbasis Yurisdiksi Kalimantan Timur. Dokumen tersebut dapat diakses melalui tautan berikut: <https://mrv.kaltimprov.go.id/access-directory>.



Apa itu EK-JERP?

EK-JERP merupakan program yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur. Melalui program ini, Pemerintah Indonesia menghitung pengurangan emisi gas rumah kaca dari keberhasilan menekan deforestasi dan degradasi hutan, dan akan menerima pembayaran berbasis hasil dari *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund*.



Apa itu IPP?

IPP adalah dokumen kerangka pengaman (safeguards) yang memberikan panduan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat. IPP mencakup pedoman mengenai proses untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dari komunitas terdampak terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan dalam program ini.



Apa itu BSP?

BSP (Benefit Sharing Plan) adalah rencana pemanfaatan dana hasil pembayaran berbasis kinerja.

- BSP pertama kali dipublikasikan pada tahun 2021 dan menjadi dasar penyaluran pembayaran pertama kepada Pemerintah Indonesia sebesar **USD 20,9 juta**.
- Berdasarkan pelajaran dari distribusi awal tersebut, BSP saat ini sedang direvisi. Sebab itu, masukan publik melalui proses konsultasi ini menjadi sangat penting untuk menyempurnakan dokumen tersebut.



Konsultasi Publik Provinsi Kalimantan Timur tentang BSP dan IPP

Samarinda



Juli – September 2025



Proses konsultasi ini terbuka untuk semua pemangku kepentingan.

Seluruh masukan yang diterima akan ditinjau dan dipertimbangkan dalam penyempurnaan dokumen. Para pemangku kepentingan akan diberi informasi mengenai bagaimana masukan mereka telah digunakan.

Bagaimana Anda Bisa Berpartisipasi?

1 Kirim masukan secara daring:

Masukan dapat disampaikan melalui email ke feedback.fcpf@kaltimprov.go.id atau <https://bit.ly/InputKonsultasiFCPF2025>.



2 Berpartisipasi secara langsung, di Kalimantan Timur.

Pemerintah akan menyelenggarakan serangkaian lokakarya konsultasi tingkat provinsi dan kabupaten di Kalimantan Timur. Berbagai kegiatan ini terbuka untuk umum dan bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak yang mungkin terdampak oleh program atau terlibat dalam pelaksanaannya.

3 Berpartisipasi dalam rapat-rapat konsultasi secara daring.

Opsi partisipasi melalui Zoom akan tersedia, dan peserta dapat menyampaikan komentar kepada penyelenggara secara langsung selama acara berlangsung.



Public Consultations

on the IPP (Indigenous People's Plan) and the revision of Benefits Sharing Plan (BSP) for The East Kalimantan–Jurisdictional Emission Reduction Program (EK-JERP), as part of FCPF.

The Government of Indonesia invites feedback on drafts of the revised Benefits Sharing Plan (BSP) and Indigenous People's Plan (IPP) for the East Kalimantan - Jurisdictional Emissions Reduction Program (EK-JERP). The documents can be accessed here: <https://mrv.kaltimprov.go.id/access-directory>.



What is the EK-JERP?



The EK-JERP is a program that aims to reduce deforestation and forest degradation in East Kalimantan. Through this program, the Government of Indonesia measures reductions in greenhouse gas emissions as a result of reduced deforestation and forest degradation, and earns a 'results-based payment' from Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund.

What is the IPP?



The IPP is a safeguards document for the program that provides guidance on the implementation of activities to ensure the protection of customary (adat) communities. It includes guidance on the processes required to obtain free, prior and informed consent from affected communities for various activities in the program.

What is the BSP?



The BSP is the plan for how to spend the results-based payment. A BSP was disclosed in 2021 and was the basis for distributions of the first payment made to the Government under the Program of USD20.9 million. Drawing on lessons learned from that initial distribution, the BSP is now being revised and public feedback on the revisions is being sought through this public consultation process.

! Public Consultation on the IPP and the revision of the BSP for the East Kalimantan



Samarinda



July – September 2025

The consultations process is open to all stakeholders. All feedback received will be reviewed and taken into account to finalize the documents. Stakeholders will be informed about how their input has been considered.

How can you participate?

1 Submit feedback online:

Feedback can be submitted via email to feedback.fcpf@kaltimprov.go.id or <https://bit.ly/InputKonsultasiFCPF2025>.



2 Participate in-person, in East Kalimantan.

The Government will organize a series of provincial and district level consultation workshops in East Kalimantan. These events will be open to the public and focused on soliciting feedback from a range of stakeholders who might be affected by the program or involved in implementation.

3 Participate in the consultation meetings online. A Zoom option will be available, and you can submit comments to the hosts online during the events.

